

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 174

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 174 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

## **WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 174 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN,  
DAN PERDAGANGAN**

**WALI KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan perlu diganti dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;

Mengingat ....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 146);

MEMUTUSKAN ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang metrologi legal pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II ....

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal kelas B pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang Metrologi Legal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ....

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang kegiatan operasional pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengawasan kemetrologian, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas bidang metrologi legal sesuai dengan lingkup dan wilayah tugasnya;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang metrologi legal; dan
  - c. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Metrologi Legal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap ....

- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Metrologi Legal wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Metrologi Legal wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Metrologi Legal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Metrologi Legal dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Metrologi Legal wajib mengadakan rapat berkala.

#### Paragraf 2

#### Hal Berhalangan

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat di wakili oleh tenaga fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.



BAB IV  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD METROLOGI  
LEGAL

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan metrologi legal;
  - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Metrologi Legal dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Metrologi Legal;
  - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Metrologi Legal dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, dan pengawasan kemetrologian;
  - f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian;
  - g. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian;
  - h. melaksanakan pengesahan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
  - i. menugaskan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian;
  - j. menyusun usulan tarif retribusi pelayanan metrologi legal;
  - k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang metrologi legal;
  - l. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang metrologi legal;
  - m. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - n. mempertanggungjawabkan ....

- n. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Metrologi Legal secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - o. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Metrologi Legal secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
  - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. kelompok JF; dan
  - b. pelaksana.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 9

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Metrologi Legal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim ....

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
  - (2) Pejabat ....

- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Metrologi Legal wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Metrologi Legal setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Metrologi Legal menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

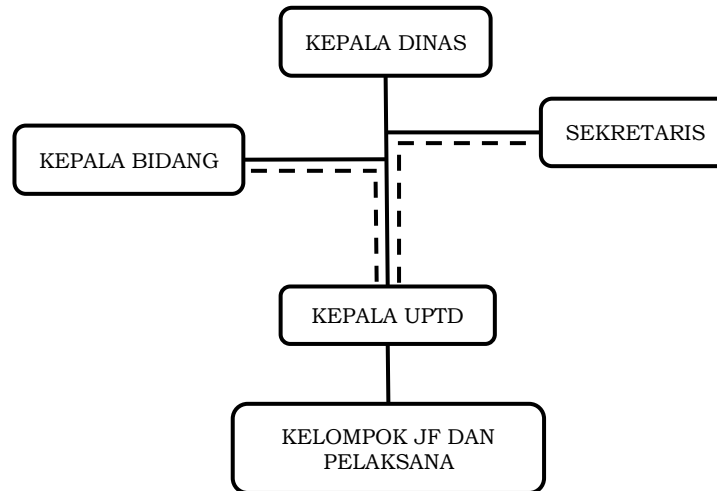
LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 174 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN  
PERDAGANGAN.

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL**



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI